

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas informasi terkait kesehatan dalam program berita televisi saat ini masih belum memenuhi hak penyandang disabilitas rungu di Indonesia untuk mengakses informasi sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Hal tersebut dibuktikan dari terbatasnya penyediaan juru bahasa isyarat dalam program berita di televisi dan belum diperhatikannya kebutuhan tayangan teks bagi penyandang disabilitas rungu seperti *closed caption*. Sehingga membatasi aksesibilitas sebagai jalan masuk terpenuhinya hak memperoleh informasi, yang menghambat mereka sebagai bagian dari masyarakat untuk mengetahui segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan melalui program berita televisi, terlebih di masa pandemi. Kerentanan yang dialami penyandang disabilitas rungu membuat mereka membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus, salah satunya berupa aksesibilitas terhadap informasi untuk menjamin kesetaraan mereka. Namun ketentuan penggunaan bahasa isyarat dalam UU Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dikembalikan pada kebijakan masing-masing lembaga penyiaran televisi masih belum mengakomodir kebutuhan khusus penyandang disabilitas rungu karena hanya digantungkan pada kesadaran saja. Padahal melalui ratifikasi CRPD, Indonesia telah berkomitmen dan mengakui hak aksesibilitas terhadap informasi melalui media yang mudah diakses, salah satunya dalam mengakses program televisi. Selain itu, keterbatasan yang ada juga memperlihatkan diskriminasi berdasarkan disabilitas karena hak mereka untuk menikmati dan memperoleh informasi di program berita televisi menjadi terbatas, yang membuat mereka menjadi tidak setara dengan orang lainnya dalam perspektif hak asasi manusia.

Meskipun demikian, mulai dilibatkannya juru bahasa isyarat di program berita televisi sudah memperlihatkan langkah yang baik, namun karena frekuensinya yang terbatas masih belum cukup memenuhi akses informasi penyandang disabilitas rungu. Bahkan fasilitas akses informasi dalam pemberitaan di program televisi seringkali belum sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas rungu di Indonesia karena masih dilibatkannya penerjemah bahasa isyarat yang menggunakan SIBI sebagai sistem isyarat yang diresmikan dan dibakukan pemerintah, yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya Tuli di Indonesia sehingga sulit untuk dipahami mereka.

- b. Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin penyediaan fasilitas akses informasi melalui program berita televisi agar dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas rungu didasarkan pada komitmen negara terhadap CRPD. Dalam merealisasikannya harus disertai penyesuaian yang tepat terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas rungu dengan cara pendekatan yang melibatkan penyandang disabilitas rungu secara aktif. Hal tersebut dibutuhkan untuk menjamin fasilitas akses informasi dalam program berita televisi sudah sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas rungu di Indonesia. Program berita televisi harus mudah diakses penyandang disabilitas supaya informasinya dapat sampai hingga dipahami dengan menyediakan penerjemah bahasa isyarat profesional, yaitu juru bahasa isyarat yang diakui oleh organisasi penyandang disabilitas rungu menggunakan bahasa isyarat yang sesuai dengan budaya Tuli di Indonesia yaitu Bisindo. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan salah satu sarana dalam rangka menjamin kemandirian, partisipasi penuh dan efektif penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, yang salah satunya dalam mengakses informasi di program berita televisi melalui hak rehabilitasi dan habilitasi sebagaimana diatur UU Penyandang Disabilitas dan CRPD. Dalam melaksanakan kebijakan maupun pengambilan keputusan mengenai segala permasalahan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas rungu, pemerintah juga harus berkonsultasi erat bahkan secara aktif melibatkan organisasi penyandang disabilitas yang mewakili mereka.

5.2 Saran

Adapun saran-saran dari Penulis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Perlu adanya peningkatan frekuensi juru bahasa isyarat yang disediakan dalam program berita televisi, agar membukakan jalan dan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas rungu terhadap informasi. Terlebih dalam kaitannya dengan kesehatan sehingga mereka dapat mengetahui segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan secara setara, khususnya dalam situasi pandemi. Pengaturan penggunaan bahasa isyarat di program siaran televisi juga harus diatur secara lebih jelas, apa saja mata acara yang disertai bahasa isyarat. Ada baiknya juga apabila ketentuan penggunaan bahasa isyarat diwajibkan selama masa pandemi terlebih pada program berita agar penyandang disabilitas rungu mendapat kesetaraan untuk mengakses informasi secara faktual. Harapannya secara bertahap dapat disertakan juga dalam program televisi lainnya yang sifatnya faktual.
- b. Perlu adanya sosialisasi kepada pihak penyelenggara siaran televisi mengenai Bisindo dan juru bahasa isyarat yang memiliki kompetensi untuk menciptakan akses informasi di media televisi yang ramah disabilitas. Ketersediaan tayangan teks berupa *closed caption* terlebih pada program berita juga bisa menjadi masukan yang baik. Selain itu, pemerintah perlu secara aktif melibatkan dan berkonsultasi dengan organisasi penyandang disabilitas rungu dalam mengatur setiap kebijakan yang berhubungan dengan mereka. Alangkah baiknya jika teknis pengawasan terhadap fasilitas akses informasi program berita di televisi melibatkan organisasi yang mewakili penyandang disabilitas rungu. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan upaya pemerintah yang berwenang secara lebih lanjut membentuk sertifikasi juru bahasa isyarat yang kompeten dan profesional. Dalam rangka mendukung saran-saran dari Penulis, sebaiknya dilakukan penelitian mengenai subsidi untuk memfasilitasi aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas rungu di media televisi terlebih dalam program berita. Selain itu juga perlu adanya penelitian terkait teknologi yang dapat mendukung penyediaan tayangan teks berupa *closed caption*.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

Buku-buku:

Alimuddin, Andi. *Televisi dan Masyarakat Pluralistik*. Jakarta: Prenada Media. 2015

Asmarudin, Imam dan Sanusi. *Hak Asasi Manusia Dan Peradilan HAM*. Brebes: Diya Media Group. 2019

Atmaja, Jati Rinakri. *Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018

Budiharjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1985

Firdaus, Muhammad Syafari, dkk. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta: Komnas HAM, 2013

Mahfud M.D. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2001

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999

Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakta. 2004 Mukhotib MD dkk. *Panduan Media Aksesibel*. SAPDA: Yogyakarta, 2021

Morissan. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kencana. 2018

Qomar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018 Sadimin. *Seri Rahasia Dibalik Televisi*. Semarang: ALPRIN. 2019

Salim, Ishak, M. Joni Yulianto, dkk. *Jaringan Pegiat Dan Organisasi Disabilitas Indonesia: Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Diterbitkan secara kolaboratif oleh

Kementerian PPN (Bappenas), Kantor Staf Presiden, JPODI, dan didukung oleh AIPJ2. 2021

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. 2001

Winarsih, Murni. Intervensi Dini Bagi Anak Tunarungu Dalam Pemerolehan Bahasa. Jakarta: Depdiknas. 2007

Yanto. Kajian Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press. 2020

Yunus, Syariduffin. Jurnalistik Terapan. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Jurnal:

Aswadi, Bobi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 1 No 1. 2019

Gumelar Gilang dkk. Bahasa Isyarat Indonesia Sebagai Budaya Tuli Melalui Pemaknaan Anggota Gerkatina. <https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/17727>

Hernawati, Tati. Pengembangan Kemampuan Berbahasa Dan Berbicara Anak Tunarungu. Vol. 7 No 1 Juni 2007
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/196302081987032-TATI_HERNAWATI/jurnal.pdf

Isma, Silva Tenrisara. Meneliti Bahasa Isyarat Dalam Perspektif Variasi Bahasa http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi_back/file/dokumen_makalah/dokumen_makalah_1540468871.pdf

Kusnadi. Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM). <http://repository.ut.ac.id/3929/1/PKNI4317-M1.pdf>

Luhulima, Hendro Valence. *Implementation Of Devotional Rights On Accessibility And Communication Based On Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Concerning Disabilities*. DIY. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2018. <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/119>

Pawestri, Aprilina. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. Volume 2 No. 1, Juni 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/90075-ID-hak-penyandang-disabilitas-dalam-perspek.pdf>

Salim, Ishak dan M. Joni Yulianto. Laporan Asesmen Cepat Dampak Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas Yang Bergerak dan Yang Terpapar di Masa Pandemi. Jaringan DPO respon Covid-19. Juni 2020

Wilujeng, Sri Rahayu. Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/5951>

Artikel Website:

Ardianto, Yoni. Memahami Metode Penelitian Kualitatif.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

Akses Informasi Tentang COVID-19 bagi Penyandang Disabilitas.

<https://aidran.org/2020/05/22/akses-informasi-tentang-covid-19-bagi-penyandang-disabilitas/>

Apresiasi dan Kendala Juru Bahasa Isyarat di Konferensi Pers Covid-19.

<https://www.solider.id/baca/5810-apresiasi-kendala-juru-bahasa-isyarat-konferensi-pers-covid19>, diakses pada 27/03/2022 Pk 22.39

Covid-19 Menghantui Akses Informasi Terhadap Difabel tak Tercukupi.

<https://www.solider.id/baca/6243-covid-19-menghantui-akses-informasi-terhadap-difabel-tak-tercukupi>

Disability and Health Promotion.

<https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability>

Erlin Sudawati, Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel KEMHAM dan TNI.
<https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>

Febri. Mengenal Lebih Dekat Bahasa Isyarat BISINDO dan SIBI.

<https://ensipedia.id/edukasi/mengenal-bahasa-isyarat-bisindo-dan-sibi/>

Hak Aksesibilitas Kesehatan Untuk Penyandang Disabilitas.

<https://nasional.tempo.co/read/1506950/hak-aksesibilitas-kesehatan-untuk-penyandang-disabilitas>

Individu Berkebutuhan Khusus (Disabilitas).

<https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2018/04/13/individu-berkebutuhan-khusus-disabilitas/>

Informasi bagi Tuli Terkait Covid-19 Belum Akses. <https://www.solider.id/baca/5857-informasi-tuli-terkait-covid19-belum-akses>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cacat>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dapat>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hak>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/informasi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/rungu>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sandang-2>
- Mewujudkan Penyiaran Yang Aksesibel Bagi Difabel. <https://www.solider.id/baca/6801-mewujudkan-penyiaran-aksesibel-difabel>
- P, Cheta Nilawaty dan Rini Kustiani. Beda Bahasa Isyarat SIBI Yang Digunakan Pemerintah Dengan BISINDO Yang Alami. *Difabel Tempo*, 20 Agustus 2020, <https://difabel.tempo.co/read/1377718/beda-bahasa-isyarat-sibi-yang-digunakan-pemerintah-dengan-bisindo-yang-alami/full&view=ok>
- Pengabaian Negara Terhadap Hak Informasi Bagi Tuli Terkait Wabah Covid-19. <https://www.solider.id/baca/5775-pengabaian-negara-terhadap-hak-informasi-tuli-terkait-wabah-covid19>
- Pusat Data dan informasi Kementerian Kesehatan RI. *Penyandang Disabilitas Pada Anak 2014*<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas-anak.pdf>
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-tunarungu-2019.pdf>
- PUSBISINDO. *SIBI Bukan Bahasa Isyarat*, <https://www.pusbisindo.org/artikel-detail/ketua-pusbisindo-sibi-bukan-bahasa-isyarat>
- SAPDA Terbitkan Panduan Media Aksesibel. <https://sapdajogja.org/2021/06/sapda-terbitkan-panduan-media-aksesibel/>
- Satuan Tugas Penanganan Covid. <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>
- World Health Organization (WHO). <https://www.who.int/about/governance/constitution>
- WHO.Disability Considerations during the Covid-19 Outbreak.* <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1>
- Wirawan, Gede Ade Putra. Surat Kepada Gubernur Bali dari Masyarakat Tuli. <https://balebengong.id/kepada-gubernur-bali-dari-masyarakat-tuli/>
- WFD. *Advancing Human Rights and Sign Language Worldwide.* <https://wfdeaf.org/our-work/human-rights-of-the-deaf/>
- WHO. *CoronavirusDisease(COVID-19).*https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1